

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara maupun pemerintahan sangat dibutuhkan dan bermanfaat karena fungsi pemerintah sangat dibutuhkan demi berjalannya suatu Negara yang efektif dan efisien. Pemerintah tidak hanya berfungsi untuk mengatur segalanya, namun semuanya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Secara umum, pemerintah bertanggung jawab untuk memegang urusan yang bersifat publik yang berkaitan dengan banyak orang atau masyarakat.

Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik, dengan begitu maka masyarakat akan semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Warga negara yang demikianlah diharapkan akan terjamin kelancaran usaha dalam mencapai tujuan nasional. Partisipasi politik akan mengusahakan, menciptakan, dan menempatkan situasi dan kondisi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang diharapkan akan terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien.

Suatu usaha dalam meningkatkan dan menetapkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi politik dapat ditempuh melalui pendidikan politik, karena politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang dilakukan secara sadar dan berencana pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.¹

¹ Rizal, *Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, <http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses tanggal 6 Januari 2020

Analisis partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.²

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* (tindakan langsung) nya, dan sebagainya.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang meningkat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).³

Penjelasan tersebut jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang yang terkemuka. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik.

Partisipasi politik masyarakat telah menjadi isu dan kajian menarik baik pemerintah, para akademisi, praktisi maupun profesional, karena partisipasi politik masyarakat memiliki

² Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan I, h. 367

³ *Ibid.*

hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia. Pentingnya partisipasi politik masyarakat yaitu suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁴

Partisipasi politik masyarakat dalam berbagai literatur umumnya menjelaskan keterlibatan masyarakat yang dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, serta memberikan suara pada hari pemungutan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk turut serta dalam partisipasi politik pemilukada. Mekanisme pemilukada langsung ini sebagai salah satu bentuk sistem pemilu yang berpusat pada kandidat, membawa konsekuensi pada menguatnya elit-elit lokal baik ekonomi maupun politik.⁵

Salah satu generasi yang sangat berpengaruh dalam partisipasi politik yaitu generasi muda. Generasi muda merupakan tiang kokoh sebuah negara, karena maju atau tidaknya suatu negara sangat ditentukan oleh generasi mudanya, peran para generasi muda dalam pembangunan nasional akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Generasi muda yaitu sumber daya manusia dalam jangka panjang sebagai penerus yang dapat menggantikan generasi saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita.⁶

Pemuda dan politik adalah dua aspek dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu bangsa, dikarenakan dari sisi itulah pemuda dapat ikut memberikan kontribusinya dalam pembangunan nasional karena tidak selamanya generasi sekarang terus

⁴ Rahmawati Halim. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat*, Makasar:CV Sah Media, Cetakan I, h.. 12

⁵ Tawakkal Baharuddin. (2017). *Modalitas Dalam Pemilukada*, Lampung : CV. Gree Publishing, Cetakan I, h.5

⁶ Rifqi Amin. (2015). *Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara, Cetakan I, h.

bertahan, maka dari itu harus ada generasi penerus yang matang dan lebih inovatif dalam membangun bangsa, dengan begitu pemuda yang ikut berpartisipasi dalam dunia politik diharapkan dapat membawa perubahan dalam demokrasi agar lebih baik lagi.

Pemuda adalah agen perubahan bagi suatu negara dan dengan adanya partisipasi dari mereka dalam dunia politik maka diharapkan akan membawa perubahan dalam demokrasi, begitu juga sebaliknya pemuda apatis dan masa bodoh terhadap politik dan kebijakan pemerintah maka negara kita tidak akan berkembang, oleh sebab itu perlunya partisipasi para pemuda untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi.

Hubungan antara peran pemerintah terhadap partisipasi politik pemuda sangat berpengaruh dalam Pemilu, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Rendahnya partisipasi politik pemuda sering dianggap sebagai kesalahan kalangan itu sendiri, oleh karena itu mereka merupakan salah satu pihak yang harus diperbaiki. Partisipasi politik pemuda hanya bisa dibangkitkan ketika karakter pemuda telah dikenali, diterima, dan dibentuk dalam prosesnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik pada fenomena tersebut dan kemudian mengambil tema penelitian Partisipasi Politik Pemuda di Kecamatan Ilir Timur II Palembang Pada Pemilu. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis seperti apa kinerja pemerintah daerah terhadap partisipasi politik pemuda di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Maka penelitian ini akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilu Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pada Kecamatan Ilir Timur II Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja pemerintah daerah terhadap partisipasi politik pemuda daerah provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Kecamatan Ilir Timur II Palembang) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah terhadap partisipasi politik pemuda daerah provinsi Sumatera Selatan (Studi pada Kecamatan Ilir Timur II Palembang).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan khususnya dibidang Ilmu Politik yang berhubungan dengan peranan pemerintah terhadap partisipasi politik pemuda pada Pemilu pada terutama di Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah terhadap partisipasi politik pemuda daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Manfaat bagi daerah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yaitu diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam peranan pemerintah pada Pemilu Sumatera Selatan.
3. Manfaat bagi pembaca yaitu diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah peranan pemerintah terhadap partisipasi politik pemuda Pemilu.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama pembahasannya dengan penelitian penulis. Namun, di beberapa sudut pandang juga terdapat beberapa aspek perbedaan dengan permasalahan yang diteliti sekarang. Beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul "Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan", yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Mohammad Nur Aris Shoim, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian atau penelitian lapangan dimana dalam memperoleh data penyusun melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sangat penting, karena partisipasi politik merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah pemilihan presiden secara umum. Kemudian, untuk mendapatkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi perlu diperhatikan bagaimana faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilihnya.⁷
2. Skripsi Tika Yulfida Bakhtiar, Program Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sumatera Utara 2016 dengan judul "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan". Penelitian ini

⁷ Mohammad Nur, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*, <http://digilib.uin-suka.ac.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2020

menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan fenomena yang dimaksudkan, dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu ternyata peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada program dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di desa Perkubuan, dan hasil yang dilaksanakannya masih kurang maksimal serta kurang bermanfaat bagi masyarakat desa pekubuan.⁸

3. Skripsi Maya Yuliantina, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul “Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajmena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan pengambilan sampel data. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah, dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik maka dapat dikategorikan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Hajimen rendah.⁹

Tabe 1.1 Pembanding Peneitian Terdahuu

Sumber : Dioah Oeh Peneiti

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/Universitas	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum	Mohammad Nur Aris Shoim/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Deskriptif Kualitatif	Untuk mendapatkan partisipasi politik masyarakat yang tinggi perlu diperhatikan bagaimana faktor

⁸ Tika Yulfida, *Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, <http://repository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2020.

⁹ Maya Yuliantina, *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajmena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, <http://repository.polnep.ac.id>. Diakses tanggal 3 Januari 2020.

	Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman			kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilihnya
2	Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tika Yulfida Bakhtiar/Universitas Sumatera Utara	Deskriptif Kualitatif	Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada program dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di desa Perkubuan, dan hasil yang dilaksanakannya masih kurang maksimal serta kurang bermanfaat bagi masyarakat desa pekubuan.
3	Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hajmena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Maya Yuliantina/Universitas Lampung Bandar Lampung	Kuantitatif	Nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah, dengan persentase yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak ikut berpartisipasi politik maka dapat dikategorikan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Hajimen rendah.

Beberapa judul penelitian tersebut diatas, peneliti mengadakan penelitian dengan fokus yang serupa yaitu mengenai analisis hubungan antara Peranan Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu tersebut yaitu terletak pada objeknya.

Penelitian Mohammad Nur Aris Shoim fokus tentang faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat akan sadarnya menggunakan hak pilihnya. Kemudian pada penelitian Tika Yulfida Bakhtiar lebih fokus pada Peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada program dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, dan pada penelitian Maya Yuliantina ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan pengambilan sampel data yaitu bahwa nilai rata-rata yang dihasilkan untuk partisipasi politik adalah 2,53 yang termasuk kategori rendah. Sedangkan, pada penelitian ini memilih mengenai analisis hubungan antara Peranan Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

a. Peranan Pemerintahan

Pemerintah merupakan struktur politik kongkrit yang paling penting dalam pengelolaan negara. Kata “pemerintah” diturunkan dari bahasa latin “gubernare” yang artinya mengarahkan, menjejaki, dan mengemudi. Bagi Plato, pemerintahan adalah proses mengarahkan pemimpin-pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Definisi Plato menempatkan peran sentral pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik ada pengemudi dan penunjuk arah bagi masyarakat. Menurut Apter, pemerintah adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan

mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya, menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.¹⁰

Pakar pemerintahan dan sekaligus arsitek desentralisasi, Ryas Rasyid dalam makna pemerintahan membagi tujuh fungsi pokok pemerintahan, yakni :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara keterlibatan dengan terjadinya permasalahan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi perbedaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintahan. Misal, pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan menyantuni anak-anak terlantar, menampung para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mendorong penciptaan lapangan kerja lain secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

¹⁰ Muhtar Haboddin. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang : Universitas Brawijaya Press, Cetakan I, h.

7. Menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan.¹¹

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini.

Menurut Adam Smith, pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*).
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Disamping itu,

¹¹ Fathur Rahman. (2018). *Teori Pemerintahan*, Malang : UB Press, Cetakan I, h. 6

fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian).

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

Fungsi pelayanan merupakan salah satu fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Menurut Sedarmayanti pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi negara.

Pada era otonomi saat ini, terdapat beberapa kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 21 dan Pasal 22 mengenai hak dan kewajiban daerah. Hak daerah antara lain adalah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.¹²

Bentuk kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 22 dapat diartikan salah satunya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, karena telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah, maka seharusnya Pemerintah Daerah mampu melaksanakan pelayanan dengan sebaik-

¹² Sedarmayanti, *Perkembangan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan*, <http://bkd.jogjaprovo.go.id>. Diakses Tanggal 18 September 2021.

baiknya. Pencarian solusi yang tepat terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi harus dilaksanakan, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala ekstern yaitu kendala yang datangnya dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan yang baik, maka kepuasan akan didapatkan oleh masyarakat. Kepuasan tersebut adalah imbalan yang diperoleh oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang telah menjadi impian bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis dalam pencapaian *good governance*? Hal ini dikarenakan pelayanan publik menjadi ranah menjalin hubungan antara pemerintah sebagai wakil dari negara dengan lembaga-lembaga non-pemerintah termasuk masyarakat. *Governance* lebih luas artiannya dari *government* dikarenakan dalam praktik *governance* melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Pelayanan publik juga akan melibatkan kepentingan semua unsur *governance*. Maka dengan alasan demikian, pemerintah perlu melaksanakan reformasi pelayanan publik dalam rangka pencapaian menciptakan *good governance*.

Upaya dalam memberikan kepastian hukum tentang pelayanan publik maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dikeluarkannya undang-undang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam rangka melaksanakan reformasi pelayanan publik dalam rangka mencapai *good governance*.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya

fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah, untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif. Berikut ini 6 (enam) fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah :

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi

Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

2. Menyediakan barang dan jasa kolektif

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3. Menjembatani konflik dalam masyarakat

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat.

4. Menjaga kompetisi

Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut

5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

6. Menjaga stabilitas ekonomi

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma.¹³

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat

¹³Dony, *Fungsi Pengaturan Pemerintah*, <https://brainly.co.id>. Diakses Tanggal 18 September 2021

sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi dan inovasi daerah, bidang sosial dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, serta bidang ekonomi dan kerjasama.
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi dan inovasi daerah, bidang sosial dan pemerintahan, bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, serta bidang ekonomi dan kerjasama.
 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
 5. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Maka, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

b. Partisipasi Politik

Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).¹⁴

Pakar ilmu politik Huntington dan Nelson telah membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain. Partisipasi yang otonom, merupakan partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang

¹⁴ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, h.19

dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik. Begitu juga sebaliknya, partisipasi politik yang dimobilisasi adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan, belum menyadari hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan.¹⁵

Reformasi telah membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem dan kehidupan politik di Indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut. Dalam pemilihan umum kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan secara langsung.¹⁶

1. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik, di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herberts

¹⁵ Arifin Anwar. (2015). *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta : Raja Garafindo, Cetakan I, h. 77

¹⁶ Hafied Cangara. (2011). *Komunikasi Politik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Cetakan I, h. 165

McClosky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai “*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*” (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum).

Definisi yang dikemukakan oleh McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.¹⁷

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sedangkan sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu

¹⁷ Khoirul Muslimin. (2019). *Komunikasi Politik*, Yogyakarta : Unisnu Press, Cetakan I, h. 158

dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik, terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, terdapat berbagai keinginan, cara dan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam suatu sistem politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pilihan politik merupakan faktor-faktor yang menentukan alternatif keputusan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik, baik sebagai anggota legislatif maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan politik.
- b. Menjadi anggota aktif dalam organisasi politik (partai politik). Artinya, ia menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik, memberikan dukungan keuangan, atau membayar iuran keanggotaan.
- c. Menjadi anggota pasif dalam organisasi politik.
- d. Menjadi anggota aktif dalam organisasi semi politik (kelompok kepentingan).
- e. Menjadi anggota pasif dalam organisasi semi politik.
- f. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi. Partisipasi semacam ini bersifat spontan, tapi sering kali diorganisir oleh partai politik atau kelompok kepentingan untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing.
- g. Partisipasi dalam diskusi politik informal. Diskusi ini berlangsung menarik karena orang bebas mengemukakan pendapat serta sikap politiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan persahabatan serta kekeluargaan diantara peserta diskusi.

h. Partisipasi dalam pemungutan suara.¹⁸

Perilaku politik seseorang dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, setiap orang memiliki pertimbangan dan alasan untuk menjatuhkan sebuah pilihan politik terhadap objek-objek politik yang mereka hadapi. Mulai dari unsur kepentingan yang dimungkinkan dapat terakomodasi, pengaruh sosial politik yang ada di sekitar termasuk peristiwa-peristiwa dan media massa, dan juga orientasi primordialisme dan sebagainya.

Cirri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik pada setiap individu. Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Oleh sebab itu, banyak Negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat berpengaruh terhadap prosesi sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi lebih aktif berpartisipasi. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Ledakan tuntutan partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi kalangan kaum muda terhadap demokrasi partisipan.

Dorongan utamanya karena di Negara demokratik pun para pengambil keputusan masih tetap orang-orang yang masih mapan. Oleh sebab itu, para penganjur demokrasi partisipan agar para pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ke-tingkat masyarakat umum agar masyarakat dapat menguasai masalah dan dapat bertindak secara politik demi kepentingan mereka.

3. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tpologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibagi menjadi :

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif adalah partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.

Artinya, setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik

¹⁸ Susi Fitria. (2017). *Sosiologi Politik*, Yogyakarta : Gre Publishing, Cetakan I, h.78

yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

b. Partisipasi Positif

Adalah partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam artian hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

c. Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena mereka menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel, partisipasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Kelompok apatis : orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spectator : orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator : komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Pengkritik : dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivis politik, komunikator, warga masyarakat, kelompok marginal dan kelompok terisolasi. Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yakni individual dan kolektif.¹⁹

4. Model Partisipasi Politik

Kesadaran politik warga negara menjadi aktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi

¹⁹ Irwansyah, *Partisipasi Politik Pemuda di Kecamatan Parado dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bima*, <http://www.ocw.ui.ac.id>. Diakses tanggal 11 Januari 2020.

ukuran dan kadar seorang dapat terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini, maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat yaitu :

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
- c. Kesadaran politik tinggi tapi kepercayaan kepadapemerintah sangat lemah maka perilaku politik yang muncul adalah militan radikal.
- d. Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat massif, artinya hanya berorientasi pada output politik. Kedua faktor politik ini bukan yang berdiri sendiri artinya tinggi rendahnya kedua faktor ini dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan ekonomi, dan pengalaman organisasi. Oleh karena itu, hubungan dari faktor-faktor dapat digambarkan sebagai status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman berorganisasi merupakan variabel pengaruh (independen). Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel antara/intervening variabel dan partisipasi politik merupakan variabel terpengaruh (Dependen).²⁰

5. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*).

Teori pilihan rasional adalah penjelasan yang mendasar dalam melihat perilaku politik pemuda yang mencakup pilihan-pilihan politik dan berbagai hal yang mempengaruhinya. Sosiologi perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh seorang aktor terhadap lingkungan perilaku aktor. Menurut penjelasan Ritzer & Goodman, antara perilaku aktor yakni individu dan lingkungannya akan terjadi proses yang saling

²⁰ Irwansyah, *op.cit.*, h. 34

mempengaruhi satu sama lain. Sebagian pemilih mengubah pilihan politik tertentu bisa saja mengubah prreferensi pilihan politik seseorang.²¹

Pilihan rasional pemuda juga didasarkan pada informasi yang dia terima dan dijadikan sebagai prreferensi seperti yang diungkapkan oleh James S. Coleman bahwa dalam pemilihan legislatif, kaum pemuda adalah sebagai individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya di dasarkan pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih pemuda dan dikaitkan dengan informasi dan prreferensi yang dimilikinya.²²

Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa saja yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting disini adalah kenyataan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tindakan aktor. Penjelasan tentang pilihan rasional seperti yang diungkapkan oleh Ritzer dan Goodman, merupakan penjelasan tentang letak rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan yang pada dasarnya bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Hal ini juga tidak menitik beratkan pada sumber pilihan tapi didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai.

Pemuda sebagai individu dalam proses pemilihan kepala daerah memiliki pilihan rasional yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak menitik beratkan pada sumber-sumber pilihan. Lebih lanjut diungkapkan oleh James S Coleman, dalam teori pilihan rasional dengan gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (persepsi). James S. Coleman juga menitik beratkan tindakan pada perseorangan dan juga mengarah pada suatu tujuan tertentu yang mengaitkan nilai, dalam hal ini adalah pilihan dan juga prreferensi. Pilihan

²¹ George Ritzer. (2010). *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Prenada Media, h. 394.

²² George Ritzer, *op.cit.*, h.358

yang didasarkan pada preferensi akan melibatkan berbagai informasi dalam suatu lingkungan sosial.

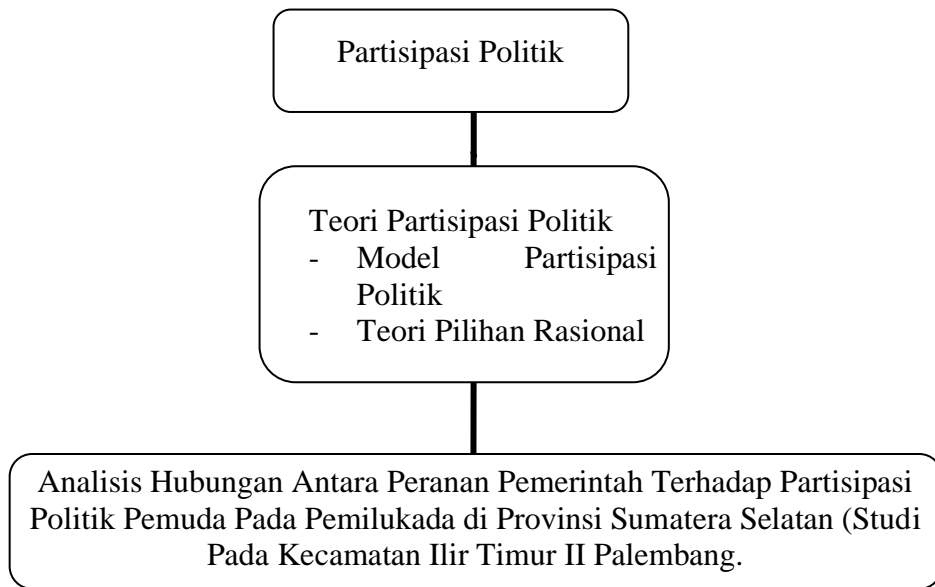
Friedmen dan Hechter mengemukakan dua gagasan lain yang menjadi dasar teori pilihan rasional. Pertama, adalah kumpulan mekanisme atau proses yang menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk menghasilkan akibat sosial, yang kedua adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya informasi dalam membuat pilihan rasional. Informasi yang dimiliki oleh individu akan dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut dan hal ini nantinya akan mempengaruhi pilihan rasionalnya.

Pilihan rasional pemuda juga didasarkan pada informasi yang dia terima dan dijadikan sebagai preferensi seperti yang di ungkapkan oleh James S. Coleman sebelumnya. Dalam pemilihan legislatif, kaum muda adalah sebagai individu yang memiliki pilihan yang didasarkan pada rasionalitas dalam memilih. Rasionalitas dalam menjatuhkan pilihannya didasarkan pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemilih pemuda dan dikaitkan dengan informasi dan preferensi yang dimilikinya.

Selain itu, dalam fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti pemilihan umum legislatif maupun eksekutif. Ketika seseorang akan memilih kandidat saat pesta demokrasi berlangsung, ia memiliki pilihan-pilihan tertentu terhadap seorang pemimpin yang akan ia pilih nanti, pada saat itulah *costbenefit* muncul dalam dirinya. Ia akan mengetahui resiko serta keuntungan seperti apakah yang kelak ia dapatkan jika ia memilih kandidat A, atau B, dsb. Jika kandidat A hanya menjanjikan pemberian sembako gratis dalam kampanyenya, sedangkan kandidat B menjanjikan pemberian sembako, pelayanan kesehatan gratis, dan memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di daerah sipemilih, maka dalam hal ini ia akan memikirkan keuntungan mana yang lebih dominan yang akan ia dapatkan dari kandidat. Tentu saja kandidat B karena banyak memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Dioah Oeh Peneiti



G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian kualitatif ini lebih banyak digunakan untuk meneliti sebuah dokumen, teks, gambar, simbol maupun menganalisis suatu keadaan ataupun kondisi dari suatu konteks sosial tertentu. Selain itu, jenis penelitian ini akan menggambarkan sekaligus menguraikan suatu pokok permasalahan yang akan dibahas kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti akan menganalisis tentang Hubungan antara Peranan Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data kualitatif

Peneliti mengambil data berupa kata-kata yang diambil dari hasil pengamatan situasi atau kejadian yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang, yang data nya berupa analisis tentang hubungan antara peranan pemerintah terhadap partisipasi politik pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan.

2. Sumber data :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan penelitian, yang didapatkan melalui observasi langsung dilapangan, wawancara mendalam ke beberapa tokoh masyarakat, pemerintah, maupun pemuda pada Pemilukada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Oleh karena itu, untuk menjaga agar data tidak keliru maka akan diperkuat dengan data sekunder.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap atau data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, artikel, skripsi, jurnal, internet serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi serta studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Hubungan antara Peranan Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Berikut akan diuraikan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Metode observasi ini dilakukan secara langsung untuk mengamati Hubungan antara Peranan Pemerintah Terhadap Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara ini peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.²³ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat bantu seperti *handphone* sebagai alat perekam percakapan, alat tulis dan alat bantu lainnya, dan ditujukan kepada objek maupun subjek penelitian yaitu pemerintahan, tokoh masyarakat serta pemuda yang terlibat dalam Pemilukada di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung yang dapat memperkuat data primer yang didapat dari sumber data yang berupa dokumentasi foto dan laporan. Peneliti mengambil beberapa data yang diperoleh melalui dokumen berupa laporan-laporan, artikel, skripsi, jurnal, internet serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

d. Lokasi Penelitian

²³ Ahmad Tanzeh. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, h. 89

Penelitian ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan analisis hubungan antara peranan pemerintah terhadap partisipasi politik pemuda pada Pemilu pada Provinsi Sumatera Selatan. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

e. Teknik Analisis Data

Peneliti akan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dokumentasi dengan cara menguraikan dan memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.